



Available online at **FACTUM**; Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
website: <https://ejournal.upi.edu/index.php/Factum>
FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 12(1), 73-84



RESEARCH ARTICLE

BORIS YELTSIN: ERA PEMERINTAHAN TRANSISI PASCA JATUHNYA UNI SOVIET

Rizal Esya Firdaus, Nana Supriatna, Tarunasena

Prodi Pendidikan Sejarah, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia

rizal_esy@outlook.com

To cite this article: Firdaus, R. E., Supriatna, N., & Tarunasena. (2023). Boris yeltsin: Era pemerintahan transisi pasca jatuhnya uni sovyet. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 12(1), 73-84. <https://doi.org/10.17509/factum.v12i1.25610>.

Abstract

This article describes the efforts made by President Boris Yeltsin who was elected as the first Russian president and how his leadership in running the political wheel during the transition period. Policy focuses on changing and accustoming society to democratic life. like the implementation of the economic liberalization program with one of them being the granting of privatization vouchers. but as is the case with an unstable transition process, the test of democracy must be faced by transitional governments such as the turmoil of regions that want to free themselves and also the readiness of the people to quickly adapt directly to major changes that occur are considered quite difficult given the seventy years of previous government that still made an impression in people's lives. The method used is a historical method which includes heuristic steps, source criticism, interpretation and historiography. The conclusion I got was that the process of democratization programmed by Boris Yeltsin led to the introduction of a top-down model, one of which was reflected in the privatization program that gave rise to the elite or oligarchy as the most prominent group resulting from the democratization. This became a blunder for the second period of Yeltsin's government, the collapse of the ruble, the non-payment of the London Club's foreign debt, and the corruption scandal of the oligarchs (Mabatex) who were in Yeltsin's circle became a bad record in his era of leadership, compounded by his health that was getting worse and worse. get worse. That fact forced him to have to resign as President of Russia on December 31, 1999.

Abstrak

Kebijakan Boris Yeltsin berfokus pada mengubah dan membiasakan masyarakat untuk hidup demokratis. Namun, seperti halnya proses transisi yang tidak stabil, ujian demokrasi harus dihadapi oleh pemerintahan transisi seperti gejolak daerah yang ingin memerdekakan diri dan juga kesiapan masyarakat untuk cepat beradaptasi langsung dengan perubahan besar yang terjadi dianggap cukup sulit mengingat tujuh puluh tahun pemerintahan sebelumnya masih membekas di kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yang meliputi langkah-langkah heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Proses demokratisasi yang diprogramkan oleh Boris Yeltsin mengarah pada pengenalan model top-down yang salah satunya tercermin dari program privatisasi yang memunculkan elite atau oligarki sebagai kelompok yang paling menonjol akibat dari demokratisasi. Hal ini menjadi blunder pemerintahan Yeltsin periode kedua, runtuhnya mata uang rubel, tidak terbayarnya utang luar negeri Klub London, dan skandal korupsi para oligarki (Mabatex) yang berada di lingkaran Yeltsin menjadi catatan buruk dalam hidupnya. era kepemimpinan, diperparah dengan kesehatannya yang semakin hari semakin memburuk. memburuk. Fakta itu memaksanya harus mengundurkan diri sebagai Presiden Rusia pada 31 Desember 1999.

Article Info

Article History:
Received 20Jun 2020
Revised 16 Jul 2022
Accepted 28 Jul 2022
Available online 01 April 2023

Keyword:

Boris Yeltsin
Demokratization
Privatizationdefense

PENDAHULUAN

Uni Soviet, negara yang dalam pengucapan bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *Union of Soviet Socialist Republics* (USSR) atau singkatnya disebut Soviet Union. Pasca Perang Dunia II Uni Soviet terkenal sebagai salah satu negara pemenang perang, perannya yang luar biasa membuat negara ini menjadi negara yang paling mempunyai pengaruh kuat terhadap perubahan politik dunia pasca Perang Dunia II yang pada saat itu memunculkan dua negara besar yang memiliki kekuatan politik “superpower” yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kebijakan Uni Soviet yang hingga tahun 1980 diwarnai oleh berbagai kebijakannya yang berfokus pada kebijakan luar negeri dengan membantu negara sekutunya atau sekalipun terlibat dengan urusan dalam negeri dari negara lain, hal tersebut tak lain sebagai upaya untuk menanamkan pengaruh ideologi komunis. Namun hal tersebut membawa konsekuensi kesulitan ekonomi di dalam negeri. Naiknya Mikhail Gorbachev di pertengahan 80an membuat perubahan dengan diberlakukannya kebijakan *Glasnots* (kebebasan) dan Perestroika (restrukturisasi).

Di satu sisi diberlakukannya *Glasnots* dan Perestroika telah berdampak besar terhadap tumbuh dan berkembangnya kebebasan dan demokrasi yang telah mengancam hegemoni Partai Komunis. Hal tersebut berdampak langsung kepada berkurangnya kontrol terhadap negara-negara wilayah bagian Soviet yang mencoba menumbangkan rezim demi mendapatkan kebebasan penuh. Rumania, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Cekoslovakia dan Jerman Timur hingga peristiwa fenomenal robohnya tembok Berlin yang menjadi simbol batas Blok Barat dan Blok Timur. Lemahnya kontrol pusat terhadap negara berdampak pada sabilitas politik negeri Rusia, kebebasan seakan menjadi jalan bagi tumbuh dan berkembangnya kubu oposisi komunis di Rusia dan negara bagian Soviet lainnya. Menguatnya kubu oposisi yang dipelopori Boris Yeltsin dan melemahnya kontrol Moskow mengakibatkan satu persatu negara-negara yang tergabung

dalam Uni Soviet, negara-negara merdeka tersebut yang kemudian mendeklarasikan Uni Soviet resmi bubar pada tanggal 26 Desember 1991.

Lemahnya pemerintahan terakhir Uni Soviet di bawah pimpinan Gorbachev telah memunculkan tokoh revolusioner yang didambakan oleh rakyat yaitu Boris Yeltsin. “Boris Nikolaevich Yeltsin lahir dari background keluarga pekerja Rusia pada 1 Februari 1931 di Butko desa kecil Siberia”. (Aron, 2000). Keluarganya tinggal di komunal atau kelompok konstruksi, di mana ayahnya bekerja. Melihat dari latar belakang keluarganya, siapapun tidak akan pernah membayangkan bahwa Yeltsin akan menjadi sosok besar dan berpengaruh dalam transisi Rusia, meskipun memang dari segi pendidikan Yeltsin merupakan anak yang berprestasi terlepas dari latar belakang keluarganya.

Berawal dari karir nya sebagai seorang insinyur konstruksi, karirnya semakin menanjak sampai dia dikenalkan dengan dunia politik. Mikhail Gorbachev terpilih sebagai Sekretaris Jenderal CPSU oleh Politbiro setelah kematian Konstantin Chernenko pada 11 Maret 1985. Tujuan utama Gorbachev adalah untuk menghidupkan kembali ekonomi Soviet. Namun, ia menjadi percaya bahwa memperbaiki ekonomi Soviet hampir mustahil tanpa mereformasi struktur politik dan sosial Uni Soviet. Untuk memulai implementasi reformasi ini, ia segera mulai mengumpulkan tim pemerintahan yang lebih muda dan lebih energetik dari anggota Partai Komunis di Moskow. Pada tanggal 4 April 1985, Yeltsin menerima telepon dari anak didik terkemuka Gorbachev, Yegor Ligachyov yang memanggilnya ke Moskow untuk mengambil posisi sebagai Kepala Departemen Konstruksi Komite Sentral Partai (Aron, 2000). Kurang dari tiga bulan kemudian, ia dipromosikan menjadi Sekretaris untuk Pembangunan Komite Pusat, posisi dalam Sekretariat Komite Pusat CPSU yang kuat.

Pada tanggal 23 Desember 1985, Mikhail Gorbachev menunjuk Yeltsin sebagai Sekretaris

Pertama Komite Kota CPSU Moskow, yang secara efektif “Walikota” dari ibukota Soviet, dan sebagai hasilnya, pada tanggal 18 Februari 1986, Yeltsin diundang untuk menjadi Calon (non-voting) Anggota Politbiro. Sebagai anggota politbiro, Yeltsin juga diberikan rumah pedesaan (*dacha*) yang sebelumnya ditempati oleh Gorbachev, yang sekarang pindah ke dacha yang dibangun dengan tujuan yang jauh lebih besar dan lebih mewah di dekatnya. Selama periode ini, Yeltsin menggambarkan dirinya sebagai seorang reformis dan populis (misalnya, ia mengambil kereta troli untuk bekerja), menghukum dan merombak stafnya beberapa kali. Dia menjadi populer di kalangan penduduk Moskow karena menghukum pejabat partai Moskow yang korup.

Setelah terjadinya konflik antara Yeltsin dan Leigor Ligachyov, dia seolah berbalik menjadi oposisi utama partai. Secara politis, memang Yeltsin masih dipandang kurang oleh para elit politik akibat keputusannya pada 1987, namun melihat usahanya dan perilakunya yang berbaur dengan rakyat, tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan lebih mendapat banyak perhatian rakyat, terlebih rakyat sudah merasa terkekang dengan pemerintahan komunis. Pada pemilihan tahun 1989, Yeltsin terkejut karena ia terpilih sebagai anggota penting di tubuh parlemen Soviet Agung dengan menerima 90 persen suara. Gorbachev terpilih (ketua) Sekretaris Jendral Uni Soviet oleh parlemen baru. “Di Moskow selama tahun 1989 dan 1990, Yeltsin menjadi seorang pahlawan rakyat di mana banyak orang meneriakkan Yeltsin, Yeltsin!”. (Aron, 2000).

Keputusan komite Sentral Partai Komunis Soviet yang mengangkat Yeltsin menjadi perwakilan dari Kongres Perwakilan Rakyat Rusia pada 29 Mei 1990 semakin membuka jalan baginya untuk membawa Rusia menuju perubahan. Puncaknya adalah terpilihnya Yeltsin sebagai presiden Rusia pada 12 Juni 1991 meskipun lawannya berasal dan dapat didukung dari CPSU (*Communist Party of the Soviet Union*) yaitu Nikolai Ryzhkov.

Kekuatan Yeltsin sebagai Presiden Rusia pertama dimanfaatkan semaksimal mungkin

olehnya, Yeltsin nampaknya menginginkan sebuah ideologi baru dan lebih condong menuju demokrasi-liberal hal tersebut tampak ketika ia melarang segala kegiatan yang berasaskan komunis di negeri Rusia, sebagaimana diungkapkan oleh Robert (1993, hlm 72) “...18 Juni 1991 pada saat kudeta pemerintahan Gorbachev, Yeltsin memberikan pidato dengan berdiri di atas tank militer yang membuatnya berhasil mendapat simpati dari rakyat Rusia. 6 November 1991 Yeltsin mengisukan larangan atas kegiatan yang bersifat komunis di tanah Rusia.

Boris Yeltsin yang terpilih secara resmi sebagai Presiden Rusia pada bulan Juni 1991, kemudian setelah empat bulan ia menjabat sebagai Presiden “...Yeltsin merencanakan bahwa Rusia akan menjalankan reformasi ekonomi menuju mekanisme radikal” (Saragih, 2008, hlm. 2). Perubahan secara radikal dari ekonomi komunis menandakan akan terjadinya perubahan 180 derajat yang mana hal tersebut mengindikasikan bahwa Yeltsin akan membawa Rusia menuju Demokrasi dan Liberalisasi seutuhnya.

Kebijakan yang dibawa Yeltsin ketika menjabat sebagai Presiden salah satunya adalah privatisasi ekonomi, privatisasi atau swastanisasi atas perusahaan-perusahaan negara merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan Yeltsin dalam menjalankan reformasi ekonominya. Salah satu mantan ahli ekonomi Uni Soviet, Marshall Goldman menyebutkan “...privatisasi tersebut sebagai ‘insider buyout’, pembelian aset-aset negara oleh orang dalam di Rusia, dan orang-orang luar yang turut berkolaborasi”. (Goldman, M, 2004). Privatisasi Rusia juga dijuluki sebagai “insider privatization” atau “oligarch privatization”, yang dilakukan pemerintah adalah menerbitkan volume bagi 144 juta warga Rusia dan mulai memprivatisasi perusahaan negara dalam skala yang besar (Islam, 1993).

Ide akan adanya privatisasi sebetulnya sudah muncul ketika berkuasanya rezim komunis atas Rusia di bawah pimpinan Gorbachev di mana pentingnya talenta dan ide dari individu unuk

menumbuhkan ekonomi, namun pada saat itu masih terhalang dengan sistem ekonomi Soviet yang kaku. Seperti yang diungkapkan oleh Acemoglu dan Robinson dalam bukunya "Why Nations Fail" bahwa: "... stimulating sustained economic growth required that individuals use their talent and ideas" (2012, hlm. 134).

Bagi masyarakat naiknya Yeltsin sebagai Presiden Rusia dengan kemenangan 57 % suara rakyat membawa sejuta harapan rakyat demi reformasi politik karena kekecewaan dengan kekuasaan komunis. Meskipun secara budaya masih kesulitan dengan adanya kebebasan yang didapatkan oleh masyarakat, hal ini diungkapkan oleh Nicholas bahwa "Rusia adalah negara yang berdiri tanpa adanya sejarah demokrasi yang kuat. Rusia diwarnai dengan pemerintahan yang otoriter selama ratusan tahun hingga keika rezim komunis yang totaliter berkuasa" (Nichols, 2002).

Kemenangan Yeltsin, runtuhnya Uni Soviet, dan merdekanya Federasi Rusia menjadi Republik yang mana Yeltsin sebagai presidennya memunculkan babak baru bagi Yeltsin dimana masalah-masalah yang muncul ketika masa transisi Soviet-Rusia harus segera diselesaikannya di awal kepemimpinan politiknya yang secara resmi sebagai presiden Rusia. Masalah transisi yang paling mencolok tentu saja adalah perbedaan prinsip antara masyarakat yang sudah lama berada di bawah pengaruh komunis yang nampaknya sudah mengikat kuat sebagai sebuah budaya khas masyarakat Rusia, namun di satu sisi pengaruh naiknya Yeltsin sebagai Presiden yang membawa ideologi baru yaitu Demokrasi-Liberal ala barat menjadi sesuatu hal yang menarik, terutama ketika melihat usahanya dalam menanamkan pengaruh baru terhadap masyarakat komunis Rusia.

METODE

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode historis atau metode sejarah yang meliputi pencarian dan pengumpulan data (heuristik), kritik, interpretasi, dan historiografi. Metode sejarah

adalah suatu proses menguji, menjelaskan, dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1975). Pernyataan tersebut senada dengan pendapat (Sjamsuddin, 2007) yang menyatakan bahwa metode historis merupakan suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis dan sistematis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau. Pendapat lain yang lebih kompleks diungkapkan oleh Nasir (2003) bahwa metode penelitian historis atau metode sejarah, yaitu merupakan suatu usaha untuk memberikan interpretasi dari bagian trend yang naik turun dari status keadaan di masa yang lampau untuk memperoleh suatu generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah, membandingkan dengan keadaan sekarang dan dapat meramalkan keadaan yang akan datang.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, peneliti menyimpulkan bahwasanya teknik penulisan dalam penelitian sejarah adalah sebuah bentuk metode penelitian tersendiri yang menjadi ciri khas ilmu sejarah yang mencoba menganalisis dan mengkritisi fakta-fakta yang didapat dari proses pengumpulan sumber yang berdasarkan waktu lampau kemudian direkonstruksi dengan metode sejarah dan pada akhirnya disusun secara sistematis sesuai kaidah keilmuan penelitian sejarah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sejarah yang lazim dipergunakan dalam penelitian sejarah.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah heuristik. Secara etimologis, heuristik berasal dari bahasa Yunani *heurishein* yang berarti memperoleh (Renier, 1997). Pada tahapan awal ini pencarian sumber menjadi hal yang utama. Dalam pencarian sumber ini penulis melakukannya melalui studi literatur. Pencarian beberapa literatur yang relevan dengan konteks pembahasan dilakukan kepada beberapa tempat, seperti perpustakaan UPI, Perpustakaan, dan melalui pencarian online.

Setelah melakukan pencarian sumber, langkah yang harus dilakukan adalah melakukan verifikasi terhadap sumber yang ditemukan

tersebut. Maka langkah verifikasi menjadi penting untuk dilakukan mengingat fakta harus bersandarkan pada fakta yang konkrit. Pada tahapan ini, penulis harus melakukan tahapan kritik eksternal dan kritik internal, dimana tahapan ini berfungsi sebagai kegiatan memverifikasi sumber yang sudah penulis kumpulkan, sejarawan berhasil mengumpulkan sumber-sumber dalam penelitiannya, ia tidak akan menerima begitu saja apa yang tercantum dan tertulis pada sumber-sumber itu. Langkah selanjutnya ia harus menyaring secara kritis, terutama terhadap sumber-sumber pertama, agar terjaring fakta yang menjadi pilihannya. Langkah-langkah inilah yang disebut sebagai kritik sumber (Sjamsudin, 2007).

Setelah sumber sudah terkumpulkan, tahap berikutnya adalah verifikasi atau kritik sejarah, atau keabsahan sumber (Kuntowijoyo, 2013). Kritik sumber yang merupakan tahapan penelitian sejarah setelah pengumpulan sumber ditujukan untuk mencari kebenaran dan kredibilitas sumber yang sebelumnya dipilih secara random (acak), adanya kritik bermanfaat untuk mencaai kebenaran sumber baik secara luaran sumber maupun yang terpenting adalah kebenaran isi sumber tersebut.

Setelah melakukan verifikasi sehingga mendapatkan fakta sejarah yang konkrit, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan interpretasi terhadap fakta yang sudah ditemukan. Tujuan dilakukannya interpretasi adalah untuk mengembangkan fakta yang beku menjadi cair karena dengan penafsiran fakta tersebut bisa berkembang menjadi sebuah asumsi-asumsi tertentu terhadap peristiwa sejarah.

Tahapan Interpretasi merupakan tindak lanjut dari tahapan kritik sumber yang telah dilakukan. Interpretasi merupakan tahapan yang dilakukan peneliti setelah mendapatkan fakta-fakta dari kritik sumber kemudian dijadikan suatu kesatuan yang utuh sebagai hasil dari penafsiran peneliti. Sjamsuddin (2007) mengemukakan bahwa “tidak ada satu kategori “sebab-sebab” tunggal yang cukup untuk menjelaskan semua fase dan

periode perkembangan sejarah”. Maka dari itu interpretasi atau penafsiran tidak berdasarkan pemikiran imajinatif dari sang peneliti namun harus merujuk kepada fakta-fakta yang telah didapat sebelumnya melalui proses kritik sumber kemudian satu sama lainnya fakta tersebut diinterpretasi yang nantinya dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini.

Langkah terakhir yang peneliti lakukan untuk menyelesaikan penelitian ini yaitu historiografi. Historiografi merupakan langkah akhir dari keseluruhan prosedur penulisan karya ilmiah sejarah, yang merupakan kegiatan intelektual dan cara utama dalam memahami sejarah (Sjamsuddin, 2007). Tahap adalah konklusi dari serangkaian tahapan penelitian sejarah dari mulai pengumpulan fakta, mengkritisnya, menginterpretasi sampai pada akhirnya tahap historiografi yang mencoba menjabarkan tulisan utuh yang diambil dari proses analisis berbagai fakta sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Runtuhnya Uni Soviet, dan terjadinya demokratisasi di federasi Rusia tidak bisa terlepas dari seorang tokoh penggerak yang berperan dalam perubahan tersebut. “...Yeltsin has played a huge and overpowering role in the birth of the new Russia” (Rutland, 1998, hlm. 693) seperti itulah yang diungkapkan oleh Rutland bahwasannya Boris Yeltsin menjadi aktor penting yang telah mengubah wajah baru Rusia. Terpilihnya Yeltsin dalam pemilihan demokratis pertama sebagai pemimpin RSFR Rusia dan jatuhnya pemerintahan Uni Soviet dibawah kepemimpinan Mikhael Gorbachev, telah menjadikan Rusia sebagai negara Independen dan tidak terikat lagi dengan Uni Soviet baik politik dalam negeri maupun luar negeri. Rusia benar-benar menjadi negara yang telah merdeka. Maka sebagai kandidat yang telah memenangkan pemilu di wilayah Rusia, Yeltsin berhak meneruskan kepemimpinan untuk wilayah Rusia dan sebagian wilayah lainnya yang dulunya bekas wilayah Uni Soviet. Priode pertama kepemimpinan Yeltsin

ini berlangsung selama empat tahun, tercatat dari bubarnya Uni Soviet sampai pemilihan umum Federasi Rusia priode kedua pada tahun 1966. Adapun langkah awal yang dilakukannya adalah merubah dasar fundamental seperti merliberalisasi sistem ekonomi, selain itu priode pertama kepemimpinannya ini juga diwarnai dengan usahanya untuk mempertahankan wilayah Rusia dari ancaman disintegrasi.

Liberalisasi Ekonomi

Berselang beberapa hari setelah jatuhnya pemerintahan komunis terakhir dan pembubaran Uni Soviet. Boris Yeltsin memutuskan untuk memulai program reformasi ekonomi yang lebih radikal dari apa yang diprogramkan Gorbachev sebelumnya. Dalam kebijakan reformasi versi Gorbachev (Perestroika) sistem ekonomi sosialis diselipkan beberapa unsur demokrasi, namun bagi rezim yang baru sistem sosialisme harus dibongkar seluruhnya dan mengimplementasikan sistem ekonomi kapitalisme sepenuhnya, mengubah ekonomi yang sebelumnya menjadi ekonomi komando terbesar di dunia menjadi ekonomi pasar bebas.

Ketika Yeltsin resmi menjabat sebagai kepala pemerintahan (sekaligus kepala negara) proses demokratisasi sebagai program reformasi Rusia dilakukan dengan model top-down, dia melakukan kesepakatan dengan para oligarki dan gubernur untuk memperkenalkan perubahan eksklusif tersebut kepada masyarakat bawah. Hal tersebut seperti apa yang diungkapkan oleh Steven Fish bahwa "...has pointed out, in every post-communist state "where democratization did not happen or was initiated and then reversed, a top-down dynamic has been at work" (Fish, 2005, hlm 186). Dampak dari hal tersebut adalah ekonomi pasar bebas yang mulai muncul di era kepemimpinan Yeltsin tidak mengubah tingkat kesejahteraan masyarakat secara langsung, justru kalangan elit atau oligarki yang lebih menonjol sebagai akibat kebijakan top-down dan memunculkan golongan baru di dalam struktur kemasyarakatan Rusia yang

dikenal dengan nama "oligarchic capitalism" (Shevtsova, 2007, hlm. 4)

Kapitalisme oligarki dapat didefinisikan sebagai bentuk kebijakan pemerintah yang secara eksklusif memberikan perintah khusus kepada elit atau bahkan golongan dari keluarga dekat pimpinan pemerintah, misalkan dalam mengakuisisi lembaga pemerintah. Lebih jelas diungkapkan oleh Baumol, Litan, dan Schramm dalam bukunya *Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity* (2007) bahwa:

Capitalism is defined as "oligarchic" when, even though the economic system is nominally capitalist and property rights protect those who own substantial property, government policies are designed predominantly or exclusively to promote the interests of a very narrow (usually very wealthy) portion of the population or, what may be worse, the interests of the ruling autocrat and his (or her) friends and family (in this instance, the system is better characterized as a "kleptocracy"). This form of capitalism is, unfortunately, all too common in too many parts of the world, encompassing perhaps one billion or more of the world's population. It is prevalent in much of Latin America, in many states of the former Soviet Union (hlm. 71).

Kapitalisme oligarki muncul semakin subur ketika arah kebijakan Yeltsin semakin serius terhadap proses liberalisasi pasar. Privatisasi atau swastanisasi yang menjadi salah satu kebijakan unggulan dari pemerintahan Yeltsin priode pertama menjadi aset penting dan wadah bisni kaum-kaum oligarki Rusia (pemodal), segala bentuk kepemilikan komunal seperti pabrik atau sekalipun perusahaan negara menjadi target privatisasi dan dialih fungsi kepada kepemilikan milik pribadi (swasta). Proses tersebut lah yang semakin memicul bermunculannya golongan baru yaitu golongan oligarchic capitalism, terutama dari orang-orang yang dekat dengan kekuasaan.

Bagi Yeltsin secara pribadi kebijakan ini telah menguntungkan dirinya untuk membangun

dan memperkuat kekuasaan. Orang-orang kaya baru (OKB) tersebut merupakan golongan kecil dalam masyarakat namun menguasai hajat hidup orang banyak dengan menguasai sumber-sumber vital negara seperti: minyak, listrik dan gas yang dapat dikuasai oleh swasta. Pada gilirannya para oligarki tersebut memiliki pengaruh bukan pada bidang ekonomi saja, namun menjalar sampai ke ranah politik. "Para orang kaya baru (OKB) ini kemudian memiliki kekuasaan yang besar, terlebih didukung oleh struktur politik yang ada. OKB yang kemudian dikenal dengan oligarkh ini membentuk lingkaran dalam (inner circle) yang mendukung sekaligus memanfaatkan kekuasaan Boris Yeltsin". (Fahrurodji, 2005. hlm. 201).

Sebetulnya program privatisasi Yeltsin tidak dimaksudkan untuk mendominasi salah satu golongan dalam struktur masyarakat (golongan pemodal) namun program ini juga terbuka untuk seluruh masyarakat Rusia. Seperti yang dijelaskan oleh Felkay (2002) bahwa

On January 1, 1992, the stifling price controls were removed and large-scale privatization began. To give the Russians a stake in the privatization, a voucher system was introduced. Every adult and child received a 10,000—ruble voucher (about \$40.00 each); altogether 144 million vouchers were distributed (hlm. 70).



Gambar 8.1: Voucher Privatisasi

Sumber: <https://www.quora.com/When-Communism-ended-in-the-Soviet-Union-in-1991-did-the-government-there-start-selling-their-properties-for-very-cheap-to-all-its-citizens>

Gambar tersebut adalah voucher yang digunakan dalam program privatisasi di era kepemimpinan Yeltsin. Voucher bernilai 10.000 rubel (sekitar Rp. 2.347.200) diberikan secara gratis kepada masyarakat dan dapat diinvestasikan kepada beberapa perusahaan milik negara, adapun jumlah voucher seluruhnya ada sekitar 144 juta voucher dan semuanya disebarkan kepada masyarakat. Namun, pada prakteknya voucher gratis tersebut dijual kembali oleh masyarakat bawah dikarenakan terjerat kemiskinan dan sebagian besarnya lagi bahkan tidak mengerti fungsi dari voucher tersebut. Sehingga pada akhirnya banyak pemilik modal yang memanfaatkan ketidaktahuan tersebut dan membeli voucher-voucher tersebut dari masyarakat miskin, hal ini lah yang menjadi salah satu faktor munculnya para kaum oligarchic capitalism. Mekanisme privatisasi yang mengandalkan pembagian voucher gratis bertujuan selain untuk meliberalisasi ekonomi, juga sebagai alat untuk memenangkan dukungan dari rakyat untuk ikut serta dan mendukung proses transisi demokrasi dan liberalisasi ekonomi pasar.

Kebanyakan masyarakat tidak mengerti terhadap adanya program privatisasi ini, namun di sisi lain ada juga yang merasa sangat diuntungkan dengan adanya kebijakan ini. Salah satunya peningkatan ada di sektor pertanian, terjadi perubahan mekanisme sistem pertanian dari pertanian komunis menuju pertanian liberal. Pada proses liberalisasi era Yeltsin petani diizinkan untuk menyewa tanah dari negara, membeli peralatan sendiri dan merekrut para pekerja. Namun hal tersebut tetap hanya menjadi wacana belaka, karena tetap yang muncul dan maju adalah para petani yang memiliki modal untuk menjalankan pertanian swasta. Secara umum privatisasi telah membawa perubahan terhadap sistem ekonomi Rusia, perusahaan-perusahaan yang sebelumnya mendapatkan subsidi dari pemerintah, perlahan dapat berkembang bahkan lebih maju dan itu dilakukan secara mandiri, namun di sisi lain dampak negatif pasti selalu ada, masyarakat kecil yang kurang

paham terhadap adanya program tersebut seakan tereliminasi dari persaingan masyarakat dan dimenangkan oleh golongan masyarakat yang memiliki modal.

Konflik Kedaerahan (Ancaman Disintegrasi)

Selain perbaikan ekonomi dengan mengubah sistem ekonomi komunal menjadi liberal, masalah lain yang harus dihadapi pemerintahan Boris Yeltsin adalah masalah otonomi daerah. Daerah-daerah yang merasa teralienasi dari pusat menginginkan kemerdekaan dan melepaskan diri dari ikatan Moskow, daerah tersebut diantaranya Chechnya, Tatarstan, Tuva, dan Buriatia. Konflik dengan Chechnya adalah yang paling parah dan menodai proses transisi demokrasi di era kepemimpinan Yeltsin sebagai seorang pahlawan demokrasi, namun dengan adanya masalah disintegrasi ini dalam penyelesaiannya dibarengi dengan berbagai permasalahan HAM, hal tersebut membuat Yeltsin mendapat kritik hebat dari Barat yang menganggapnya sebagai bos komunis gaya lama.

Keinginan Yeltsin untuk meredakan masalah disintegrasi bangsa dengan cara yang menurut mata Barat adalah cara demokratis sebetulnya sudah dilakukan olehnya. Hal tersebut diungkapkan Aron bahwa "Yeltsin has consistently pursued a policy of gradually lengthening the leash connecting the provinces to the center in order to keep the link from snapping altogether". Menjaga hubungan dengan daerah terutama daerah-daerah yang menuntut otonomi dipenuhi oleh Yeltsin dengan memberi mereka otonomi daerah dan hak istimewa pajak (Aron, 1993).

Federasi Rusia yang sebut saja dapat dikatakan sebagai negara baru tidak ingin kehilangan semua republik warisan Soviet, Chechnya adalah salah satu republik yang sudah diputuskan harus tetap menjadi bagian dari federasi. Di bawah kepemimpinan Dzhokar Dudayev, Chechnya mendeklarasikan kemerdekaan penuh pada tahun 1993, namun tidak semua warga Chechnya setuju akan

ide tersebut masih banyak warganya yang loyalis terhadap Rusia sehingga memicu gejala perang saudara di republik tersebut. Para loyalis tersebut mendapat dukungan langsung dari Moskow untuk memenangkan perang melawan sparatis pimpinan Dudayev, hal tersebut memicu semakin meningkatnya ketegangan antara Chechnya dan Rusia. Seperti yang diungkapkan oleh Strauss "Earlier in the year. Moscow had begun to fund and support Chechen rebels who were opposed to President Dudayev" (Strauss, 2006, hlm. 253)

Selain mendanai para loyalis untuk berperang melawan pasukan Dudayev, tentara Rusia pun dikerahkan dalam penumpasan gerakan sparatis tersebut, pasukan Rusia dikirim ke Chechnya pada akhir 1994 untuk mengakhiri pemberontakan, serangan tersebut dikatakan merupakan serangan yang tak terorganisir dan membabi buta dan menjadi ajang eksekusi Grozny ibukota Chechnya, dan banyak juga menewaskan banyak warga sipil. Dijelaskan lebih lanjut oleh Strauss (2006) bahwa *poorly organized, and badly executed attack on Grozny In November 1994 By December, Russian forces were pummeling Chechnya with massive aerial bombardments. But the aerial attacks did not have the desired effect. Rather than capitulating to the clearly superior air power of Moscow, the Chechens dug in. And as so often happens in these 'precision-bombing- campaigns. many bombs missed their mark, killing an untold number of civilians.*

Agresi militer Rusia untuk menumpas para sparatis di Chechnya yang merujung pada jatuhnya korban dari pihak sipil mendapatkan kecaman dari dalam maupun dari dunia internasional. Organisasi-organisasi hak asasi manusia menuduh pasukan Rusia terlibat dalam penggunaan kekuatan yang tak pandang bulu dan tidak proporsional setiap menghadapi perlawanan dan mengakibatkan banyak kematian warga Sipil. Menurut Human Right Watch, serangan artileri dan roket Rusia menewaskan sedikitnya 267 warga sipil selama serangan ke pihak separatis pada Desember 1995 (Human Right Watch, 1996).

Penyelesaian mengenai masalah Chechnya di era kepemimpinan Boris Yeltsin dapat terlaksana ketika priode kedua pemerintahannya yaitu pada 12 Mei 1997. Lebih jelas diungkapkan oleh Sakwa (2005) bahwa *in Russia, but also internationally. Full recognition of the sovereign status of Chechnya, however, required an agreement with Russia. A formal peace treaty between Russia and the 'Chechen Republic of Ichkeria' was sign at a televised ceremony in the Kremlin on 12 May 1997, though it was highly unusual in form, and unlike any of the power-sharing treaties that Yeltsin had signed with Tatarstan and other republics of the Russian Federation. In theory, the May 1997 treaty was significant because it locked the Yeltsin leadership into the peace process.*

Periode pertama kepemimpinan Yeltsin, sebagaimana selayaknya masa pemerintahan transisi harus menghadapi dukungan atau sekalipun penolakan terhadap pemerintahan. Masalah Chechnya menjadi bentuk nyata yang harus dihadapi Yeltsin untuk mempertaruhkan karisma kepemimpinannya, ia tidak mau melepas begitu saja salah satu wilayah yang sudah dinyatakan sebagai wilayah bagian dari Federasi Rusia, apapun jalannya akan dicapai untuk mempertahankannya baik itu diplomasi, perang atau sekalipun terror. Namun karena kudu belah pihak saling "keukeuh" mempertahankan idealisnya, dan pertumpahan darah semakin tidak dapat dihindarkan, maka perjanjian damai harus segera dilaksanakan terlebih di pihak Federasi Rusia dan secara khusus Yeltsin mendapat tekanan dari dunia internasional. Pemberian otonomi daerah sebesar-besarnya bagi Chechnya sudah cukup untuk meredakan panasnya konflik kedua belah pihak (sampai nantinya kembali menjadi masalah disintegrasikan di era Valdimir Putin).

Priode Kedua Pemerintahan Boris Yeltsin (1996-1999)

Pemerintahan Boris Yeltsin priode kedua yang bukan lagi masa transisi demokrasi namun lebih kearah kedewasaan demokrasi, meskipun

sebagian berpendapat bahwa kepemimpinan Yeltsin seluruhnya adalah masa proses transisi demokrasi. Dimulai dari pertarungan kembali ideologi di dalam proses pemilihan presiden 1996, sampai pengunduran Yeltsin sebagai presiden Rusia pada tahun 1999 yang mewariskan berbagai permasalahan. Priode kedua pemerintahan Boris Yeltsin sebagai presiden Rusia diwarnai berbagai catatan buruk. Jatuhnya nilai mata uang Rubel, tidak terbayarkannya hutang luar negeri London Club, dan skandal korupsi para oligarki (*Mabatex*) yang berada dilingkarang Yeltsin menjadi catatan buruk di era kepemimpinannya, diperparah dengan kesehatannya yang semakin memburuk. Berbagai masalah kesehatan yang diderita oleh Yeltsin membuatnya harus meninggalkan tugas kepresidenannya karena operasi yang harus di jalannya, seperti yang diungkapkan oleh Gidadhubli (2000, hlm 259) bahwa "Since his second term of president-ship, Yeltsin has been suffering from various serious ailments including an operation. Very often he had been either in hospital or convalescing for weeks". Desas-desus terkait kemundurannya akibat masalah kesehatan mulai ramai diperbincangkan dikalangan masyarakat. Pemberitaan media bahkan mulai bersepekulasi terkait penerus masa jabatan sisa Yeltsin. Namun, beberapa isu tersebut telah terbantahkan dengan kembalinya Yeltsin ke kantor untuk bekerja dan menyatakan bahwa ia baik-baik saja "...then returned to work declaring that he was fit and fine negating rumours about his ill-health and often sacking high officials to show that he was in command of the situation." (Gidadhubli, 2000).

Memang kesehatan menjadi salah satu faktor penurunan atau mungkin buruknya pemerintahan Yeltsin selama priode kedua, namun hal tersebut tidak lebih besar dari krisis yang harus melanda ekonomi Rusia, jatuhnya nilai mata uang Rubel membuat harga barang-barang pokok semakin melambung tinggi yang membuat banyak rakyat menjerit akibat dampak dari krisis tersebut. Krisis dan anjloknya nilai mata uang Rubel diakibatkan

terjadinya pelarian modal asing dengan puncaknya pada tahun 1998.

Sistem perbankan Rusia yang memiliki utang jauh lebih besar ketimbang asetnya dan penyimpanan uang para oligarki dalam jumlah besar di luar negeri semakin memperparah perekonomian Rusia. Tindakan devaluasi pun tidak dapat dicegah, kurs Rusia anjlok dari 6.1 Rubel menjadi 21 Rubel per dolar AS pada Agustus 1998. Akses Rusia untuk meraih modal baru di pasar internasional pun tertutup sudah, jangkakan investor asing, para oligarki pun tidak akan mau segera merepatriasi modalnya ke dalam negeri. Akhirnya pada Desember 1998, Rusia menyatakan tak sanggup lagi membayar utang yang jauh tempo sekitar 360 juta dollar USD ke London Club. (Saragih, 2008).

Belum cukup untuk menyelesaikan krisis dalam negeri, tuduhan luar negeri terhadap Yeltsin yang terlibat skandal korupsi semakin memanaskan situasi di Rusia, rakyat mulai bertanya-tanya mengenai hal tersebut. Publikasi artikel di media barat yang menghubungkan Yeltsin secara pribadi dengan sejumlah skandal di Rusia. Laporan muncul di surat kabar Italia Corriere della Sera, yang melaporkan penyelidikan terhadap kucuran dana ke dalam kartu kredit keluarga Yeltsin. Dugaan tersebut telah terbukti bahwa Yeltsin terlibat dalam kasus tersebut. Diungkapkan oleh Sarre, Das & Albercht (2004, hlm. 171) bahwa *During a probe of the Swiss company Mabetex, records were found relating to credit cards issued to Boris Yeltsin and his daughters, Tatyana Dyachenko and Yelena Okulova. Mabetex, which received \$335 million worth of contracts for the restoration of the Kremlin and other government buildings, had transferred millions of dollars to the private account of Pavel Borodin at a Budapest bank. Borodin, who was the director of the department for real estate and services in the Kremlin, was very powerful and at that time considered to be number two after Yeltsin, and he is believed to have received a million dollars in compensation. On the Mabetex balance sheet, the amounts appeared as local special expenditures.*

Menguaknya kasus tersebut kepada publik, namun jelas menunjukkan bahwa Yeltsin tidak akan pernah secara resmi didakwa korupsi karena ada imunitas presiden Rusia, tetapi tidak bagi rakyat, hal tersebut adalah sebuah kegagalan yang telah membuat popularitas Yeltsin menurun drastis dan berubah menjadi kebencian dikalangan masyarakat seolah semakin mendorongnya ke arah pengunduran resmi sebagai presiden.

Pengunduran Diri

Krisis yang dialami Rusia, perilaku demoralisasi para pejabat tinggi dilingkaran pemerintahan Yeltsin atau sekalipun terkemukanya kasus korupsi Yeltsin's Family tentu saja hal tersebut telah memicu kemarahan rakyat Rusia yang memintanya untuk segera melakukan pengunduran resmi sebagai presiden. Demonstrasi di jalan-jalan sudah tidak aneh menyuarakan kemunduran Yeltsin, tak hanya dari rakyat secara langsung tekanan pun datang dari para perwakilan rakyat yaitu Dewan Federasi yang mendesak kemunduran Yeltsin secara sukarela "*...almost half of the members of the Federation Council called for the voluntary and prompt retirement of the president*". (Medvedev, 2000, hlm. 3).

Pemimpin Partai komunis Gennady Zyugahanov, Walikota Moskow Yuri Luzhkov dan banyak pengkritik di Barat dan di Rusia telah bereaksi terhadap masalah kesehatan Yeltsin dan terhadap skandal politik keluarga dan keuangan beberapa tahun terakhir, dan berpendapat bahwasannya sudah saatnya Yeltsin pergi.



Gambar 8.2 Pidato Pengunduran Diri Yeltsin Melalui Televisi

Sumber: <http://archives.cnn.com/1999/WORLD/europe/12/31/yeltsin.resign.01/index.html>

Gambar tersebut merupakan salah satu cuplikan televisi yang menayangkan pidato pengunduran diri Boris Yeltsin. "I resign" kata yang diulangi beberapa kali dalam pidatonya melalui canal televisi yang disiarkan kepada seluruh warga Rusia pada 31 Desember 1999. Bagi sebagian orang, berita tentang pengunduran diri presiden tidak mengejutkan, Yeltsin telah pernah menghadapi proses pemakzulan (mosi tidak percaya) sebanyak tiga kali. Dalam pidatonya di juga memuji kemajuan dalam kebebasan budaya, politik, dan ekonomi yang telah dilakukan selama era pemerintahannya dan juga meminta maaf kepada rakyat Rusia karena tidak banyak membuat impian masyarakat Rusia menjadi kenyataan. Maka pidato tersebut secara resmi telah mengakhiri pemerintahan Boris Yeltsin.

SIMPULAN

Pada era kepemimpinan Boris Yeltsin priode pertama, upaya untuk menguatkan pengaruh demokratisasi di Rusia lebih fokus kepada liberalisasi ekonomi, dia memutuskan untuk memulai program reformasi ekonomi yang lebih radikal dari apa yang diprogramkan Gorbachev sebelumnya. Dalam kebijakan reformasi versi Gorbachev (Perestroika) sistem ekonomi sosialis diselipkan beberapa unsur demokrasi, namun bagi rezim yang baru sistem sosialisme harus dibongkar seluruhnya dan mengimplementasikan sistem ekonomi kapitalisme sepenuhnya, mengubah ekonomi yang sebelumnya menjadi ekonomi komando terbesar di dunia menjadi ekonomi pasar bebas. Proses demokratisasi yang di programkan oleh Boris Yeltsin mengarah pada pengenalan model *top-down*, salah satunya tercermin dalam program privatisasi yang memunculkan kalangan elit atau oligarki sebagai golongan yang paling menonjol akibat dari adanya demokratisasi tersebut. Selain terjadinya liberalisasi dalam periode kepemimpinan pertama Yeltsin diwarnai dengan ancaman konflik kedaerahan, upaya Chechnya untuk memerdekakan diri berhasil diredam pada akhirnya dengan pemberian otonomi sebesar-

besarnya pada daerah itu, meskipun pada awalnya harus mengerahkan kekuatan militer dan Yeltsin mendapat kecaman dari berbagai organisasi penggerak HAM dalam usaha mempertahankan wilayah Chechnya tersebut.

Sementara, pada era kepemimpinan Yeltsin periode kedua yang diawali dengan kemenangannya dalam pemilihan Presiden Rusia 1996. Pemilihan Presiden Rusia tahun 1996 yang diikuti sebelas calon (satu orang mengundurkan diri tepat sebelum pemilihan dimulai) harus dilaksanakan dua kali putaran karena suara yang tidak terkonsentrasi pada salah satu calon. Pemilihan yang dimenangkan Boris Yeltsin menjadi ajang pembuktian kedewasaan demokrasi, tidak adanya campur tangan Barat secara langsung dalam membantu Yeltsin dan demokrasi menjadi bukti kekuatan Yeltsin yang sudah menanam pengaruh kuat bagi kemenangan demokrasi, dukungan dari para kaum oligarki kapitalisme yang menguasai media seperti televisi dan surat kabar yang menjadi hasil dari liberalisasi ekonomi pada era kepemimpinan Yeltsin di periode pertama, sangat membantunya dalam proses kampanye dan mendapatkan kemenangan dengan jumlah suara yang meyakinkan. Meskipun ketika proses pemilihan banyak spekulasi yang menyudutkan dirinya mengenai pimpinan yang dikelilingi oligarki yang korup, namun hal tersebut bukan sebuah halangan untung memenangkan pemilihan sekaligus menjadikannya terpilih kembali sebagai presiden untuk kedua kalinya. Spekulasi terkait pribadi Yeltsin ketika pemilihan 1996 benar-benar terbukti pada masa jabatannya yang kedua. Jatuhnya nilai mata uang Rubel, tidak terbayarkannya hutang luar negeri London Club, dan skandal korupsi para oligarki (*Mabatex*) yang berada di lingkaran Yeltsin menjadi catatan buruk di era kepemimpinannya, diperparah lagi dengan kesehatannya yang semakin memburuk. Kenyataan tersebut memaksanya harus mengundurkan diri sebagai Presiden Rusia pada 31 Desember 1999 yang disiarkan secara langsung melalui televisi, dalam pidatonya dia

memuji kemajuan dalam kebebasan budaya, politik, dan ekonomi yang telah dilakukan selama era pemerintahannya dan juga meminta maaf kepada rakyat Rusia karena tidak banyak membuat impian masyarakat Rusia menjadi kenyataan.

REFERENSI

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. New York: Crown Books.
- Aron, L. (2000). *Yeltsin: A Revolutionary Life*. New York: St. Martin's Press
- Baumol, W. J., Litan, R. E., & Schramm, C. J. (2007). *Good capitalism, bad capitalism, and the economics of growth and prosperity*. New Haven: Yale University Press.
- Fahrurudji, A. (2005). *Rusia baru menuju demokrasi*. Yayasan Pustaka Obor.
- Felkay, A. (2002). *Yeltsin's russia and the west*. Greenwood Publishing Group
- Fish, M. S. (2005). *Democracy derailed in Russia: The failure of open politics*. Cambridge: Cambridge University Press
- Gidadhbuli, R.G. (2000). Resignation of boris yeltsin: why now?. *Economic and Political Weekly*, 35(5), hlm. 259-261 <http://www.jstor.org/stable/4408870>
- Goldman, M. I. (2004). Putin and the oligarchs. *Foreign Affair Journals.*, Vol. 83, No. 33.
- Gottschalk, L. (1975). *Understanding history : a primer of historical method* (Terjemahan Nugroho Notosusanto). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Human Right Watch. (1996). *Rusia federation*. [Online]. Diakses dari <https://www.hrw.org/reports/1996/WR96/Helsinki-16.htm>
- Islam, S. (1992). Russia's Rough Road to Capitalism. *Foreign Affair Journals*, 72(57).
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. Tiara Wacana
- Medvedev, R. (2000). Boris yeltsin resigns. *Russian Politics & Law*, 38(4), hlm. 82-88. doi:10.2753/rup1061-1940380482
- Nasir, M. (2003). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nichols, T. M. (2002). Putin's first two years: democracy or authoritarianism?. *Current History*, 101(657), 307
- Rais, A. (t.t). *Kembalinya Kelompok komunis di eropa timur*. Yogyakarta: Laporan Penelitian Universitas Gadjah Mada
- Renier, G.J. (1997). *Metode dan manfaat ilmu sejarah*. Pustaka Pelajar
- Robert, D. (1993). *The end of the communist revolution*. Routledge
- Rutland, P. (1998). The boris yeltsin of history. *Demokratizatsiya*, 6(4), hlm. 692-693.
- Sakwa, R. (Penyunting.). (2005). *Chechnya: from past to future*. Anthem Press.
- Saragih, S. (2008). *Bangkitnya Rusia: peran putin dan eks kgb*. Jakarta: Penerbit Kompas
- Sarre, R. Das, D.K & Albrecht, H. (2004). *Policing corruption: international prespective*. Lexington Books
- Shevtsova, L. (2007). *Russia lost in transition: the yeltsin and putin legacies*. Washington: Carnegie Endowment.
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Strauss, S. (2006). *The complete idiot's guide to world conflicts, 2nd edition: get the stories behind the headlines*. Kiel: Alpha Editions
- Tanpa Nama. (2009). *Михаил сергеевич горбачёв* (Mihail Sergeevič Gorbačëv). [Online].Diakses dari http://www.archontology.org/nations/ussr/ussr_state/gorbachev.php